



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Periksa Saksi Ahli Dariiii Kemendes

### Penyidik segera tetapkan Tsk

**KOTA BINTUHAN** - Jika tidak ada halangan, hari ini (27/1) penyidik Unit Tipikor Polres Kaur akan meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI. Terkait dengan aturan pelaksanaan proyek yang menggunakan dana desa (DD). Sebab DD di Desa Wayhawang Kecamatan Maje, proyek DD tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga. Bukan melalui swadaya masyarakat.

Setelah pemeriksaan ini selesai, penyidik akan melakukan gelar perkara. Untuk menetapkan tersangka (Tsk) yang bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp 280 juta dalam pengelolaan DD Wayhawang tahun anggaran 2017.

Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S,IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman membenarkan kalau saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan keterangan saksi. Baik itu saksi dari Kemendagri hingga saksi dari Kemendes RI dengan keterangan saksi ini pihaknya dapat menguatkan berita acara pemeriksaan. Terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan bukan dilakukan oleh

masyarakat sekitar.

"Untuk saat ini kita masih butuh keterangan saksi dari Kemendes. Setelah itu baru kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan gelar perkara. Gelar perkara akan kita laksanakan dalam waktu dekat untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Kita ingin awal bulan depan semua sudah jelas karena berbagai saksi sudah kita mintai keterangan dalam kasus ini," pungkas Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman.

Kasus ini diketahui naik ke tingkat penyidikan, setelah hasil audit BPK dan Inspektorat tidak ditindak lanjuti oleh mantan Kades Desa Wayhawang Midirlan. Yaitu mengembalikan hasil temuan sebesar Rp 280 juta. Padahal sudah 60 hari pihak Polres Kaur memberikan waktu kepada mantan kades untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

Setelah hasil audit keluar dan kasus ini naik dari penyelidikan menjadi penyidikan, penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap mantan kades tersebut. Hanya pemeriksaan awal di awal tahun 2018 lalu. "Untuk pemeriksaan mantan kades akan kita laksanakan setelah pemeriksaan ahli rampung. Dan minggu depan mungkin kasus ini juga sudah kita gelarkan," pungkas Kasat Reskrim. (cik)